



**PEMERINTAH KOTA
DENPASAR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya ditengah pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar pada saat pemulihan Pandemi Covid-19 baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 ini bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 28 Maret 2024



WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Tlp. (0361) 234876 Fax. (0361) 227160
www.denpasarkota.go.id email: inspektorat@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku penyusun laporan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Denpasar, 26 Maret 2024

Inspektur Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN REVIU	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. DASAR HUKUM	11
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR.....	12
1. Kondisi Geografis.....	12
2. Kondisi Demografis.....	13
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI...	18
1. Kewenangan	18
2. Tugas Pokok	19
3. Struktur Organisasi.....	19
E. Aparatur Pemerintah.....	20
1. Berdasarkan Eselonisasi.....	20
2. Berdasarkan Pendidikan.....	20
3. Berdasarkan Jenis Jabatan	21
4. Berdasarkan Golongan	21
F. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	22
1. BAB I PENDAHULUAN	22
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
4. BAB IV PENUTUP	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
C. Formula Perhitungan Capaian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	33
B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	35
C. Akuntabilitas Keuangan	87
D. Analisa Efisiensi.....	90
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021-2023 (ribu jiwa).....	14
Tabel 1.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2021-2023.....	16
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Tahun 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	16
Tabel 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	25
Tabel 2.2	Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023.....	28
Tabel 2.4	Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	30
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023	33
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja	34
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan.....	36
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2021-2023)	38
Tabel 3.5	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2021-2023)	39
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	41
Tabel 3.7	Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2021 - 2023 menurut Kabupaten/Kota.....	41
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	44
Tabel 3.9	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Bali.....	46
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Mengentaskan Kemiskinan.....	47
Tabel 3.11	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota se Provinsi Bali Tahun 2021-2023	47
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	49

Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Kasus Kriminalitas	53
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Ketahanan Pangan	55
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	57
Tabel 3.16.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	60
Tabel 3.17.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas	62
Tabel 3.18.	Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023.....	63
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Mengurangi Pengangguran	64
Tabel 3.20.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	66
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Inovasi Daerah.....	69
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	71
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	73
Tabel 3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan.....	83
Tabel 3.25	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2023	87
Tabel 3.26	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar	88
Tabel 3.27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2023.....	13
Gambar 1.2	Grafik Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar, 2018 – 2023.....	14
Gambar 1.3	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk	15
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	19
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja	35
Gambar 3.2	Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Provinsi Bali Tahun 2023.....	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2023 merupakan Tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 17 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- **Misi 1. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 2. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target) yang masih memakai nilai tahun 2022 dikarenakan data belum rilis dari BPS.
- **Misi 3. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

- **Misi 4. terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 5. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 17 indikator sasaran, diketahui bahwa 9 indikator atau 53% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 7 indikator atau 41% kategori Baik, 1 indikator atau 6% kategori Baik namun masih memakai data tahun 2022. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 termasuk dalam Kategori “Baik Sekali”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023, serta hasil reviu sasaran dan indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2023 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta

- Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Sebagai Ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- Sebelah selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Bena
- Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara geografis Kota Denpasar terletak di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 125,78 km² (2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali) yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,89 km² (40% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 26,69 km² (21%), dan

Denpasar Timur dengan luas wilayah sebesar 25,93 km² (20%). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 23,46 km² (19%). Selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2023



Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka, 2023

2. Kondisi Demografis

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembangunan dibidang kependudukan bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Beban tersebut diantaranya pengangguran yang tinggi, kriminalitas meningkat dan perekonomian yang buruk. Selain kualitas penduduknya, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

Dari segi jumlah, penduduk Denpasar cukup banyak dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 748.400 orang di tahun 2023, angka ini hampir mencapai 16,99% dari jumlah penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4.404.300 orang (Proyeksi BPS 2023).

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021 -2023 (ribu jiwa)

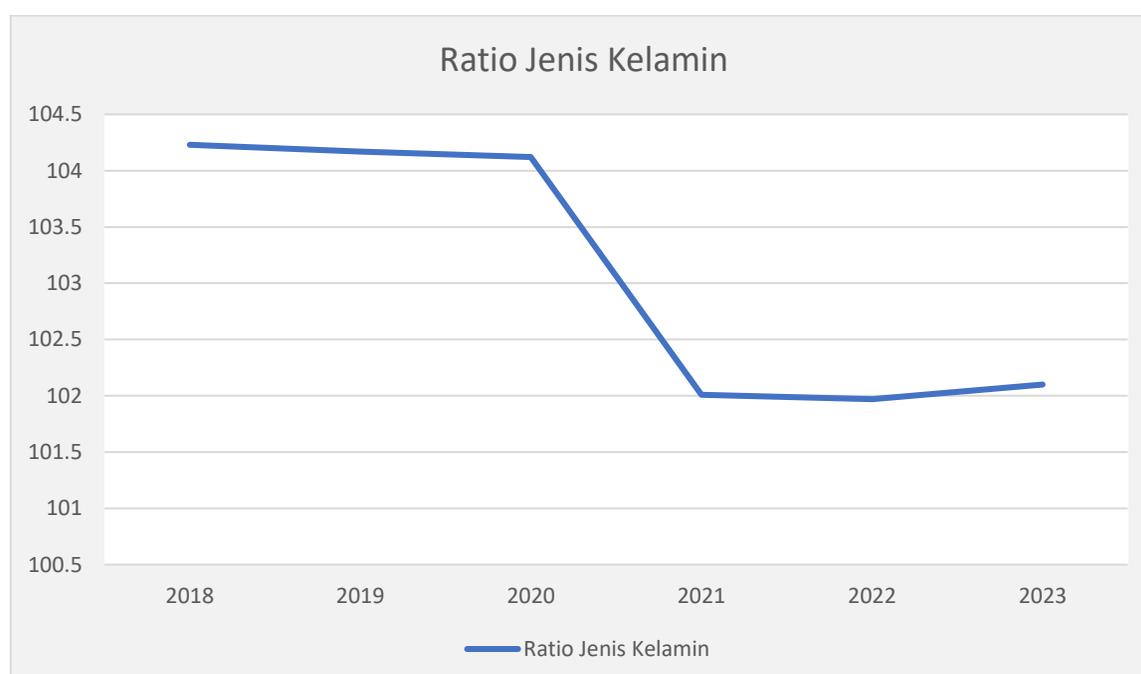
Jenis Kelamin	2022	2023
Laki - laki	374,3	378,1
Perempuan	366,7	370,3
Jumlah	741	748,4

Sumber: Proyeksi Interim Penduduk, BPS Kota Denpasar, 2023 (Data diolah)

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2023 menurut data proyeksi BPS mencapai 748.400 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 378.100 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 370.300 jiwa.

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/sex ratio (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2022-2023, sex ratio penduduk Denpasar berada pada kisaran 102. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan terdapat 102 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Gambar 1.2 Grafik Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar, 2018 – 2023



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS 2023

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 0,02%. Secara rinci grafik trend laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : BPS data diolah 2023

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Gambaran piramida penduduk Denpasar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2015 dan 2022, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing masing kelompok umurnya.

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Denpasar tergolong kota yang sangat padat di Provinsi Bali.

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2021-2023

Uraian	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2021	726,6	5.686
2022	726,8	5.774
2023	748,4	5.247

Sumber : Proyeksi BPS Kota Denpasar, 2023

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Denpasar merupakan yang terbesar di Bali karena menjadi pusat pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi Bali. Pada Tahun 2023 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 2,54 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 116,68 (2018=100) pada November 2023 dan menjadi 116,56 pada Desember 2023. Sementara itu, tingkat Inflasi tahunan Kota Denpasar Tahun 2022 yakni 6,44 persen dan turun menjadi 2,54 persen pada Tahun 2023. Penurunan Tingkat Inflasi di Kota Denpasar menjadi salah satu acuan bahwa perekonomian di Denpasar semakin baik.

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi Tahun 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar.

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,95	6,70	6,36
Pakaian dan Alas Kaki	-2,50	1,18	-1,61
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	-0,02	4,60	0,93
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	10,39	8,63	-0,46
Kesehatan	0,78	2,78	0,82
Transportasi	2,23	15,15	1,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,68	-1,02	0,23
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-3,78	5,99	1,91
Pendidikan	-0,67	3,64	5,27
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,72	5,82	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,96	8,49	3,35
Umum	2,01	6,44	2,54

Sumber : BPS Bali, 2023

Jika diurai menurut penyumbangannya, inflasi Kota Denpasar Tahun 2023 yakni 2,54 persen tercatat disumbang masing-masing kelompok I (makanan, minuman dan tembakau) sebesar 6,36 persen; kelompok IX (pendidikan) sebesar 5,27 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lain) sebesar 3,35 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga dan budaya) sebesar 1,91 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) sebesar 1,07 persen; kelompok VI (transportasi) sebesar 1,07 persen; kelompok III (perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sebesar 0,93 persen; kelompok V (kesehatan) sebesar 0,82 persen; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sebesar 0,23 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar -0,46 persen, dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) sebesar -1,61 persen.

**Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2021-2023**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	-0,65	2,98	3,66
Kab. Tabanan	-1,98	2,93	3,56
Kab. Badung	-6,74	9,97	11,29
Kab. Gianyar	-1,05	4,04	5,06
Kab. Klungkung	-0,23	3,12	4,70
Kab. Bangli	-0,33	2,80	3,50
Kab. Karangasem	-0,56	2,58	3,10
Kab. Buleleng	-1,27	3,11	3,64
Kota Denpasar	-0,92	5,02	5,69
Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB/ekonomi Kota Denpasar sebesar -0,92 persen. Hal tersebut disebabkan akibat pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02 persen dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 5,69 persen. Peningkatan ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Denpasar kembali membaik dan pulih pasca Pandemi Covid-19.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kewenangan

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ;

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) Tenaga kerja
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan

18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian.

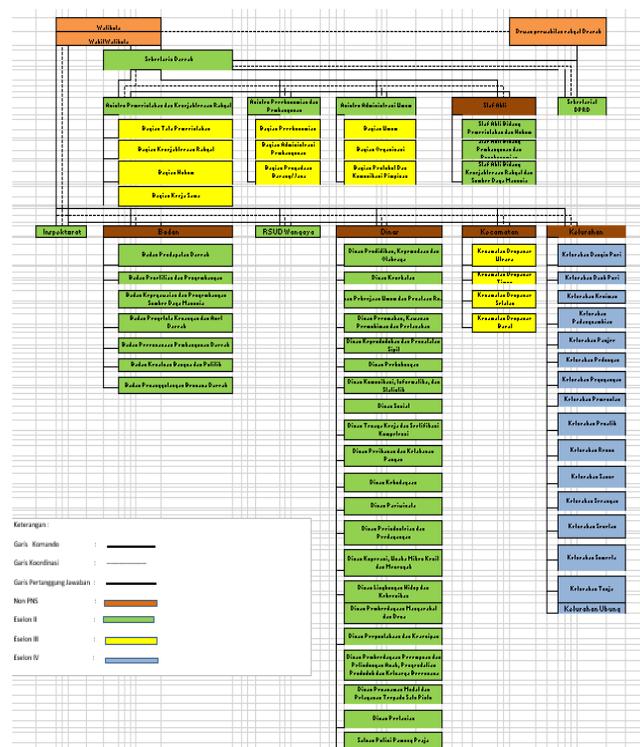
2. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, 2023

Dalam Perkembangannya, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2023 telah membentuk Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar telah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan terdapat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar yang dipisah tugas pokok dan fungsinya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

E. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2023 sebanyak 5.847 orang, terdiri dari :

1. Berdasarkan Eselonisasi

NO	ESELON	JUMLAH
1	II.a	1
2	II.b	38
3	III.a	54
4	III.b	119
5	IV.a	140
6	IV.b	99
7	Non Eselon	5.396
JUMLAH		5.847

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2023

2. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	APDN	1
2	D.I	6
3	D.II	29
4	D.III	386
5	D.IV	55
6	D-I / A-I	1
7	D-II / A-II	15
8	D-III / A-III	7
9	PGAH	1

10	PGSD	1
9	S 1 / A IV	307
11	S1	3.687
11	S1.IIP	5
12	S2	501
13	S3	9
14	SD	59
15	SLTA	678
17	SLTP	99
TOTAL		5.847

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2023

3. Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Fungsional	997
2	Guru	2.777
3	Pelaksana	1.622
4	Struktural	451
JUMLAH		5.847

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2023

4. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	50
2	II	762
3	III	2.690
4	IV	1.011
5	IX (PPPK)	1.334
JUMLAH		5.847

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2023

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, kewenangan, tugas pokok serta struktur Organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis, rencana kerja, pengukuran kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini menguraikan tentang Realisasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan secara umum atas capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar serta Langkah – Langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 :

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (sustainable), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan

Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan 6 (enam) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1 Indeks Pendidikan
		2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	2 Angka Harapan Hidup (Tahun)
		3 Meningkatkan pendapatan masyarakat	3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
		4 Mengurangi Kemiskinan	4 Angka Kemiskinan (%)
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	5 Meningkatkan upaya penanganan pelanggaran PERDA	5 Persentase penegakan PERDA (%)
		6 Menurunnya kasus kriminalitas	6 Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)
		7 Meningkatkan ketahanan pangan	7 Indeks Ketahanan Pangan
		8 Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8 Indeks Resiko Bencana
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	9 Rata-Rata SKM (%)
		10 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10 Predikat SAKIP
			11 Opini BPK
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	11 Mengurangi Pengangguran	12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		12 Optimalnya pemanfaatan teknologi	13 Indeks SPBE

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		13 Meningkatkan Inovasi Daerah	14 Predikat inovasi daerah
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	14 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	15 Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar (%)
		15 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	16 Indeks Kualitas Hidup
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	16 Meningkatkan pembangunan kebudayaan	17 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar, 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan Tahun awal dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 859.861.940.328,00 dengan realisasi sebesar Rp 728.039.508.395,00. Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	422.466.614.033,00
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	8.871.714.266,00
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	55.888.703.124,00
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	10.560.475.009,00
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	317.048.122.500,00
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	45.046.311.396,00
TOTAL ANGGARAN		859.861.940.328,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2023 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan

adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan targetnya.

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2023 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 17 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,779
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,46
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.422.121
4	Mengurangi kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,01
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	5	Persentase penegakan PERDA	Persen	89,34
6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Angka	105,63

7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,7
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	98,72
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM	Persen	88,16
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP	Predikat	A (80,01)
		11	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,18
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE	Indeks	3,7
13	Meningkatnya inovasi daerah	14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	60,47
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,95
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68,54

Sumber : Penetapan Kinerja Walikota Denpasar Tahun 2023

D. Formula Perhitungan Capaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran pencapaian ke-17 (tujuh belas) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka disusun formula perhitungan IKU dan sumber data, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Indeks Pendidikan	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil pemetaan/survey Badan Pusat Statistik
2	Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil penghitungan / survey BPS
4	Angka Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Banyaknya Orang Miskin}}{\text{Total Penduduk Denpasar}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
5	Persentase penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Dinas Satpol PP
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Pusat Statistik	Hasil penghitungan / survey BPS
7	Indeks Ketahanan Pangan	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Ketahanan Pangan	Hasil penghitungan / survey Badan Ketahanan Pangan Nasional
8	Indeks Resiko Bencana	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Hasil penghitungan / survey BNPB
9	Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total SKM PD/UPP}}{\text{Total PD/UPP}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
			Pelayanan Publik (UPP)
10	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori)	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB
11	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil pemetaan/survey BPS
13	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN RB
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Indeks Kualitas Air} + \text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}}{3}$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) Bappeda

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 16 (enam belas) sasaran.

Formula penghitungan terhadap IKU Kota Denpasar sebagian merupakan formula yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagian IKU mengadopsi formula pengukuran yang sudah dilaksanakan secara nasional, baik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kementerian. Selain itu, sumber data untuk mendapatkan capaian juga berasal dari capaian yang memang hasil penghitungan dari perangkat daerah teknis maupun yang terpublikasi secara resmi dari BPS dan Kementerian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 101,005% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN									
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	0,779	0,776	99,61489089	0,786	98,72773537
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					99,614				
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN									
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	75,46	75,59	100,1722767	76,04	99,40820621
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					100,172				
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT									
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.980.000	2.422.121	2.343.025	96,73443234	2.844.242	82,37783564
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					96,734				
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN									
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	2,01	2,68	99,66666667	1,95	99,62564103
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					99,667				
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA									
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	89,34	89,58	100,2686367	90,84	98,61294584
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :					100,268				
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS									
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	105,63	153,69	99,54501562	105,33	99,54087155
Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :					99,545				
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN									
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	93,7	95,8	102,2411953	94,6	101,2684989
Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :					102,241				
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA									
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	98,72	98,18	100,00547	90,1	99,91032186
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					100,005				
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK									
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,77	88,16	91,9	104,2422868	89,66	102,498327
Rata-rata Capaian Kinerja 9 :					104,242				

SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI									
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	A (80,01)	BB (76,82)	96,01299838	A (80)	96,025
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98,006				
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN									
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03	5,08	4,18	2,85	100,3181818	6,62	100,5694864
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					100,318				
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI									
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	3,7	3,8	102,7027027	3,9	97,43589744
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					102,702				
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH									
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif (55,68)	Sangat Inovatif	Inovatif (59,17)	98.61666667	Sangat Inovatif	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					98,616				
SASARAN 14 : MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR									
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	60,47	72,54	119,9603109	64,86	111,8408881
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					119,960				
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91	58,71	61,95	58,78	94,88297014	62,13	94,60807983
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					94,882				
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN									
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97	63,85	68,54	68,47	99,89786986	74,84	91,48850882
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					99,897				

Sumber : LKjIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023

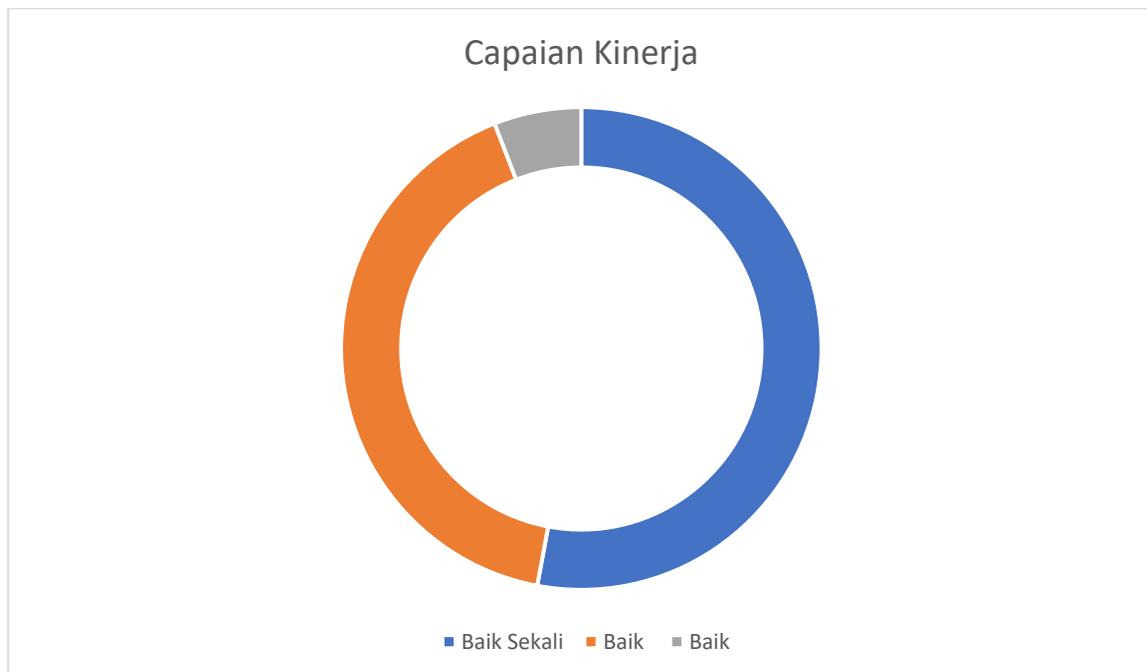
Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 menggunakan skala seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.

Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja



Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, diketahui 9 indikator atau 53% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 7 indikator atau 41% kategori Baik, 1 indikator atau 6% kategori Baik namun masih memakai data tahun 2022. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 101,05% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 termasuk dalam Kategori “Baik Sekali”. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian Tahun 2022, yaitu penilaian Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana. Dimana sampai dengan pelaporan LKjIP Tahun 2023 ini disusun, hasil penilaian belum dirilis oleh BPS.

B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut.

TUJUAN 1. MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR

Untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar, pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- d. Mengurangi kemiskinan

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” yang telah ditetapkan. Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN									
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	0,779	0,776	99,61489089	0,786	98,72773537
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					99,614				

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Indeks Pendidikan. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan di suatu Daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pendidikan yang unggul dan bermutu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel 13.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020–2023
Human Development Index by Regency/Municipality in Bali Province, 2020–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Jembrana	73,18	73,57	74,38	74,8
Kab. Tabanan	76,67	76,95	77,22	77,87
Kab. Badung	81,60	81,84	82,13	83,00
Kab. Gianyar	77,88	78,21	78,87	79,69
Kab. Klungkung	72,97	72,98	73,77	74,18
Kab. Bangli	70,60	70,60	71,47	71,99
Kab. Karangasem	68,50	68,58	69,48	70,09
Kab. Buleleng	73,60	73,60	74,48	74,87
Kota Denpasar	83,95	84,04	84,39	84,68
Provinsi Bali	76,52	76,69	77,40	78,01

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index



(sumber : IPM Indonesia 2020-2023, Infografis BPS Nasional Tahun 2024, <https://www.bps.go.id>)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar Tahun 2023 yakni sebesar **84,68** meningkat 0,29 dari tahun 2022 yakni dengan nilai 84.39 dengan IPM Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 78,01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Level Nasional Tahun 2023 dengan nilai 74,39. Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa IPM Kota Denpasar Tahun 2023 melebihi nilai IPM Provinsi Bali dan IPM Nasional.

Tabel 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2021-2023)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	8,35	8,64	8,65
Kab. Tabanan	9,14	9,15	9,35
Kab. Badung	10,62	10,64	10,90
Kab. Gianyar	9,29	9,55	9,80
Kab. Klungkung	8,14	8,46	8,48
Kab. Bangli	7,18	7,47	7,57
Kab. Karangasem	6,33	6,67	6,68
Kab. Buleleng	7,25	7,56	7,57
Kota Denpasar	11,48	11,50	11,52
Provinsi Bali	9,06	9,39	9,45

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 3.5 Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2021-2023)

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	12,92	13,01	13,02
Kab. Tabanan	13,01	13,03	13,04
Kab. Badung	13,99	14,03	14,22
Kab. Gianyar	13,97	14,01	14,09
Kab. Klungkung	13,00	13,02	13,12
Kab. Bangli	12,35	12,49	12,52
Kab. Karangasem	12,42	12,62	12,63
Kab. Buleleng	13,08	13,26	13,27
Kota Denpasar	14,09	14,10	14,11
Provinsi Bali	13,40	13,48	13,58

Sumber : Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar Tahun 2023 sebesar 11,52 (tahun) meningkat dari tahun 2022 sebesar 11,50. Untuk harapan lama sekolah Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 14,11 (tahun) meningkat dari tahun 2022 sebesar 14,10 (tahun).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Pendidikan yaitu rata – rata lama sekolah yang tidak mencapai target pada tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menargetkan Rata – rata Lama Sekolah sebesar 11.60 sedangkan realisasinya sebesar 11.52. Masih ada 0.08 yang tidak tercapai. Adapaun faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target Rata – rata Lama Sekolah di Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Faktor Intern : - Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar - Masih adanya angak putus sekolah di tingkat SD dan SMP - Masih kurangnya jumlah sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar - Masih belum tercapainya rasio jumlah guru dengan siswa
2. Faktor Ekstern : - Lama sekolah diatas 9 tahun yang merupakan jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Propinsi.

Program yang mendukung tercapainya IKU ini ditahun 2023 adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan 4 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal. Pelaksanaan Program/Kegiatan ini dimaksimalkan dengan melakukan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana, serta pemberian bantuan kepada siswa miskin. Program yang dilakukan ini untuk mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun.

Perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU Indeks Pendidikan, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
2. Memenuhi kebutuhan guru agar sesuai rasio jumlah siswa - Membangun sekolah baru sesuai kebutuhan jenjang pendidikan - Memaksimalkan kegiatan pendidikan kesetaraan (program kejar paket A/B/C).

Selain itu, kami juga mengembangkan beberapa aplikasi inovasi untuk menunjang proses pembelajaran dan pendataan tenaga pendidik, yaitu Aplikasi Si Sekat, Melanoid, dan Jaya Gupta.

Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh Disdikpora di tahun 2023, antara lain:

1. Katagori Dinas Pendidikan Inspiratif Penguatan Profil Pelajar Pancasila dari Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan nilai 97,85 (Kualitas Tertinggi dan Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia

2) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kualitas Pelayanan Kesehatan merupakan gambaran kemampuan/Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN									
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.26	75.3	75.46	75.59	100.1722767	76.04	99.408
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					100,304				

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2023 yaitu 75,59 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu:

- a. Sudah terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar
- b. Anggaran Kesehatan perkapita pertahun di Kota Denpasar sudah cukup tinggi
- c. Anggaran Kesehatan sudah lebih dari 10% dari total APBD Kota Denpasar sesuai amanat Undang-undang.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Denpasar berada diatas capaian angka harapan hidup Provinsi Bali dan Nasional. Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2023 mencapai 75,59 Tahun. (sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023).

Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,46 Tahun, dapat terealisasi sebesar 100,1% (Baik Sekali). Data harapan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2021 - 2023 menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	72,46	72,82	73,20
Kab. Tabanan	73,75	74,10	74,48
Kab. Badung	75,18	75,51	75,88
Kab. Gianyar	73,78	74,13	74,52
Kab. Klungkung	71,41	71,83	72,28
Kab. Bangli	70,62	70,97	71,33
Kab. Karangasem	70,56	70,89	71,25
Kab. Buleleng	71,95	72,32	72,70
Kota Denpasar	74,93	75,30	75,69
Provinsi Bali	72,24	72,60	72,98



(sumber : IPM Indonesia 2020-2023, Infografis BPS Nasional Tahun 2024, <https://www.bps.go.id>)

Umur Harapan Hidup Tingkat Nasional Tahun 2023 adalah 73,93 Tahun. Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa Umur Harapan Hidup Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali dan Tingkat Nasional pada Tahun 2023 yakni sebesar 75,59 Tahun. (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar)

Program yang mendukung tercapainya IKU tahun 2023, terdapat 5 program antara lain, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pelaksanaan Program ini dimaksimalkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan sasaran ibu, bayi, balita. usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif, dan usia lanjut. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup.

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil nilai IKU antara lain:

1. Inovasi DAMAKESMAS (Denpasar Mantap Pelayanan Kesehatan Masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Inovasi Jaring Emas (Penjaringan dan Edukasi Kesehatan Masyarakat) bertujuan untuk peningkatan screening kesehatan pada penduduk usia 15 tahun keatas)
3. Inovasi Surat Cintaku (Surat Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan untuk Kunjungan Ulang) bertujuan memberikan KIE(Komunikasi Informasi Edukasi) perihal yang tertuang dalam SURAT CINTAKU

- (jenis imunisasi, jadwal sesuai umur, tanggal kunjungan ulang, KIE pra dan pasca imunisasi)
4. Inovasi Ngobras Seni (Ngobrol Asyik Seputar Imunisasi) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya orang tua anak yang menjadi sasaran imunisasi dasar dan lanjutan
 5. Kelon Bumil (Kelas Online Ibu Hamil) yaitu Kegiatan penyuluhan online melalui grup WhatsApp bagi ibu hamil di wilayah kerja puskesmas
 6. Rental Elektrik (Remaja Sehat Mental Tanpa Asap Rokok Konvensional Dan Elektrik) bertujuan Melakukan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada remaja di sekolah SMP dan SMA untuk dilatih dan diberi informasi terkait dampak jangka panjang dari merokok
 7. TOBAT (Temukan, Obati, Beri dukungan, Ajak bersosialisasi, Terima di keluarga dan masyarakat) bertujuan bertujuan untuk meningkatkan penemuan kasus ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan meningkatkan capaian pasien ODGJ yang mendapatkan pengobatan
 8. KOPRI Mantap (Komprehensivitas Algoritma P2PTM Menuju Masyarakat Terskrining Mantap) bertujuan Melaksanakan screening PTM (Penyakit Tidak Menular) serta edukasi PTM (Penyakit Tidak Menular) via WhatsApp auto reply
 9. Penyuluhan KB (Keluarga Berencana) di Desa/Kelurahan dengan sasaran Ibu PKK oleh Petugas Promkes (Promosi Kesehatan) dan Petugas KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di Puskesmas
 10. Si Kepo Hitam (Skrining Kesehatan di Posbindu cegah Hipertensi dan Diabetes Mellitus) yaitu kegiatan Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, cek kolesterol, gula darah dan asam urat di Posbindu
 11. Gelatik Nyaring bertujuan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian PTM
 12. OOP4YOUTH (One Stop Service For Youth) yaitu Pelayanan kesehatan terpusat utk remaja (edukasi serta skrining PTM pada remaja)

Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, antara lain:

1. Penghargaan Swasti Saba Wistara atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kota Sehat Tahun 2023

2. Penghargaan Snitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai Kota STBM Pratama
3. Seluruh Puskesmas di Kota Denpasar memperoleh Akreditasi Paripurna
4. Puskesmas I Denpasar Selatan, Kategori Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksinasi COVID-19 Terbaik di Provinsi Bali (PPKM Award)
5. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur telah mengikuti proses Standardisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang dilaksanakan pada bulan Maret-September 2023.

3) Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT									
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,281,414	1,980,002	2,422,121	2,343,025	96.73443234	2,844,242	82.37783564
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					96,734				

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja dari hasil realisasi Tahun 2023 terkait rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Denpasar yakni sebesar 96,73 %. Adapun hasil analisis dapat dilihat dari gambar dan tabel dibawah.

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan tingkat Nasional, Tahun 2023



(sumber: Susenas 2023, <https://bps.go.id>)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tingkat Nasional Tahun 2023 yakni Rp. 1.451.870.



(sumber : Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2024)

Tabel 3.9 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)								
	Makanan			Non Makanan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	557,566	546,555	586,854	557,105	582,350	626,227	1,114,672	1,128,905	1,213,080
Kab. Tabanan	595,526	528,160	696,041	709,218	566,907	954,886	1,304,744	1,095,066	1,650,927
Kab. Badung	730,046	707,274	914,434	1,081,761	1,034,694	1,281,731	1,811,807	1,741,969	2,196,165
Kab. Gianyar	629,025	638,938	709,628	984,078	1,086,589	1,202,982	1,613,103	1,725,527	1,912,609
Kab. Klungkung	486,600	561,560	635,127	484,229	721,987	725,050	970,829	1,283,547	1,360,177
Kab. Bangli	546,195	606,612	709,102	540,712	589,968	712,595	1,086,908	1,196,580	1,421,697
Kab. Karangasem	416,441	414,353	458,365	387,243	414,397	541,605	803,683	828,750	999,970
Kab. Buleleng	523,204	518,557	561,751	437,998	449,495	588,292	961,202	968,052	1,150,043
Kota Denpasar	796,413	730,821	904,445	1,328,648	1,249,180	1,438,580	2,125,061	1,980,002	2,343,025
Provinsi Bali	628,472	609,855	729,755	840,152	832,754	1,011,768	1,468,624	1,442,610	1,741,523

(Sumber: Source Url: <https://bali.bps.go.id/indicator/5/38/1/rata-rata-konsumsi-per-kapita-sebulan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>)

Dari tabel dan gambar diatas dapat dikatakan capaian rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Denpasar belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun rata-rata pengeluaran per kapita Sebulan di Kota Denpasar Tahun 2023 yakni sebesar **Rp 2.343.025** menjadi yang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota bahkan melebihi Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk meningkatkannya pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan beberapa strategi yaitu meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, mendorong tumbuhnya investasi, mendorong tumbuhnya sector pariwisata, mendorong peningkatan ekspor, dan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan. Dengan adanya beberapa strategi dimaksud, program yang mendukung guna mencapai strategi tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan UMKM, Program Promosi Penanaman Modal, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

4) Sasaran Mengurangi kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan

kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Mengentaskan Kemiskinan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN									
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.1	2.97	2.01	2.68	99.66666667	1.95	99.62564103
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					99,667				

Dari Tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 2,01%, capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,667% (Baik).

Tabel 3.11 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota se Provinsi Bali
Tahun 2021-2023.

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	5,06	5,30	4,96
Kab. Tabanan	5,12	5,18	4,70
Kab. Badung	2,62	2,53	2,30
Kab. Gianyar	4,85	4,70	4,47
Kab. Klungkung	5,64	6,07	5,61
Kab. Bangli	5,09	5,28	5,28
Kab. Karangasem	6,78	6,98	6,56
Kab. Buleleng	6,12	6,21	5,85
Kota Denpasar	2,96	2,97	2,68
Provinsi Bali	4,53	4,57	4,25

(Sumber: BPS Bali, 2023)

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. (sumber: <https://bps.go.id>)

Berdasarkan gambar tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Kemiskinan di Kota Denpasar pada Tahun 2023 yakni **2,68 persen**. Tingkat kemiskinan di Kota Denpasar menurun dari tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Bali sebesar 4,25 persen dan Nasional sebesar 9,36 persen.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	14,24	15,00	14,12
Kab. Tabanan	23,11	23,46	21,42
Kab. Badung	18,52	18,28	17,01
Kab. Gianyar	25,36	24,74	23,76
Kab. Klungkung	10,19	10,89	10,22
Kab. Bangli	11,68	12,17	12,24
Kab. Karangasem	28,52	29,45	27,83
Kab. Buleleng	40,92	41,68	39,52
Kota Denpasar	29,41	30,02	27,69
Provinsi Bali	201,97	205,68	193,78

Adapun Hambatannya dalam menanggulangi kemiskinan adalah Kesulitan dalam pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Karena mobilitas penduduk yang tinggi.

Program yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana.

Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar

Tujuan terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Denpasar pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya penanganan pelanggaran PERDA
- b. Menurunnya kasus kriminalitas
- c. Meningkatkan ketahanan pangan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

5) Sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

Penegakan PERDA harus dilaksanakan karena sesuai dengan misi kedua RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar yakni Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan

Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan untuk terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar. Berikut tabel analisis sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA.

Sasaran ini terdapat pada PK Walikota Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2023 merupakan awal dari target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA									
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88.84	89.14	89.34	89.58	100.2686367	90.84	98.61294584
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :					100,268				

Dari tabel diatas diketahui bahwa Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100,268% (Baik Sekali) yang diperoleh dari target 89,34% dan terealisasi sebesar 89,58%. Realisasi 89,58 % ini di dapat dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data penegakan perda dan perwali pada tahun 2023 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{215}{240} \times 100\% = 89,58\%$$

Realisasi 89,58 % didapat dari Dari total jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perwali sejumlah 215 kasus yang terselesaikan dibagi dengan total jumlah kasus pada tahun 2023 sejumlah 240 pelanggaran dikali 100%

Dari 240 kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, yaitu IMB sebanyak 41 kasus, pelanggaran reklame sebanyak 74, ijin usaha 10 kasus, ijin mikol sebanyak 1 kasus, ketertiban umum 114 kasus.

Dari total kasus tersebut dilakukan penyelesaian melalui 2 mekanisme yaitu non yustisi dan yustisi, Tindakan non yustisi dilakukan berupa pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan dan pemberian surat teguran agar mematuhi ketentuan Perda kepada pelanggar dengan total 136 surat pernyataan / Teguran. Sedangkan Tindakan yustisi dilakukan dengan melaksanakan sidang tipiring kepada 5 pelanggar perda di Kota Denpasar serta Tindakan pembongkaran dan pembinaan sejumlah 74 pelanggaran reklame.

Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya.

Capaian dalam sasaran Strategis Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA sudah baik sekali, **namun ada beberapa kendala** dan permasalahan dalam pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

1. Peran Sat.Pol. PP dalam Penegakan Perda dan Perwali bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).
2. Posisi Strategis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat mobilitas pertumbuhan pembangunan, perekonomian yang sangat pesat.
3. Mobilitas penduduk pendatang yang semakin meningkat.
4. Serta faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang tidak mendukung saat penertiban, konflik kepentingan dengan masyarakat/ormas, serta keterbatasan sumber daya aparatur Serta sarana dan prasarana.
5. Dalam Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, terdapat pula faktor yang mempengaruhi jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota

satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas.

Program yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda, kedua kegiatan tersebut dimaksimalkan dengan sosialisasi perda kepada masyarakat, kemudian meningkatkan patroli dan cegah dini pelanggaran perda.

Inovasi yang dilaksanakan adalah Inovasi Garbasita (Gerakan Bersama Siaga Kota) dengan memanfaatkan fitur Wa Chat BOT untuk melaporkan setiap pelanggaran perda yang ada di Kota Denpasar Oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat Kota Denpasar dalam deteksi dini pelanggaran perda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mengembangkan Inovasi “GARBASITA”. yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama Siaga Kota. Adalah Strategi Deteksi Dini Penegakan Perda secara Humanis, Edukatif, Responsif dan Kolaboratif dengan semangat Vaisudhaiva Kuthumbakam”. Gagasan Inovasi tersebut merupakan suatu terobosan strategis, dibangun untuk menjawab kepastian dan kejelasan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara humanis, edukatif, responsif dan kolaboratif dalam semangat gotong royong gerakan bersama di wilayah Kota Denpasar. Keterbatasan sumber daya manusia serta belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yaitu melalui chat Whatsapp BOT untuk memberikan informasi terupdate selain itu kesadaran partisipasi masyarakat sebagai upaya cegah dini gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan, merupakan suatu tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dengan mengedepankan nilai-nilai humanis, edukatif, responsif dan kolaboratif. Melihat hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat serta menggunakan teknologi sebagai penerapan digitalisasi. Partisipasi tersebut melalui kolaborasi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia agar dapat lebih berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Satpol PP senantiasa perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menyelesaikan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Untuk mengoptimalkan kinerja tentunya Satpol PP memerlukan keterlibatan dan kolaborasi serta sinergitas dengan berbagai stakeholder, terutama dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan factor yang sangat penting terlebih didukungnya sarana prasaran digitalisasi dalam mempercepat pelaksanaan tugas.

Adapun Solusi yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/ Kelurahan dalam wadah Satpol PP.
2. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran peraturan perundang – undangan melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya.
3. Mulai adanya Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP Kota Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi /pusat;
4. Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Denpasar untuk mentaati perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah Kota Denpasar, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

6) Sasaran Menurunnya Kasus Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana (crime crite) dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak

pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana yang dilaporkan dengan jumlah penduduk.

Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan/pidana (crime rate) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat.

Secara umum sejak tahun 2012 sampai dengan 2021, risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan pola menurun. Pada tahun 2012 tercatat risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) di Bali sebesar 219,36 per seratus ribu penduduk. Angka ini terus menurun hingga pada capaian terendah tahun 2018 sebesar 68,92. Risiko penduduk terkena tindak pidana mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 77,61, namun kembali menurun menjadi 66,72 per seratus ribu penduduk pada Tahun 2020 dan 61,66 per seratus ribu penduduk pada tahun 2021. Adapun analisis ketercapaian sasaran dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Menurunnya Kasus Kriminalitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS									
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105.73	89.83* (data 2021)	105.63	153.69* (data 2022)	99.54501562	105.33	99.54087155
Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :					99,545				

Risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana yang dilaporkan dengan jumlah penduduk. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan Tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

Pada Tahun 2021, Angka risiko penduduk terkena tindak pidana di Kota Denpasar sebesar 89,83 per seratus ribu penduduk. Angka pada Tahun 2022, yakni 105,63 per seratus ribu penduduk sedangkan untuk Tahun 2023 belum rilis dari BPS terkait Statistik Kriminal Provinsi Bali. Untuk capaian tahun 2023 masih menggunakan angka capaian Tahun 2022, yaitu 105,63.

Dari analisis tabel diatas, capaian kinerja sasaran sudah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 99,545 (Baik). Hal tersebut menunjukkan tingkat keamanan di Kota Denpasar harus ditingkatkan dan dijaga lagi.

7) Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN									
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93.4	91.82	93.7	95.8	102.2411953	94.6	101.2684989
Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :					102,241				

Berdasarkan tabel diatas target Indeks Ketahanan Pangan sudah melebihi dengan target yang ditetapkan. Mengingat Nilai Indeks Ketahanan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Apresiasi IKP terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Provinsi dengan IKP terbaik (87,65%), Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten dengan IKP terbaik (92,16%), **Kota Denpasar sebagai kota dengan IKP terbaik (95,80%)**, Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku sebagai kabupaten dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, dan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sebagai kota dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik. (sumber: <https://badanpangan.go.id/>)

Kota Denpasar menjadi Kota dengan Indeks Ketahanan Pangan terbaik se-Indonesia yakni dengan nilai indeks **95,80%**. Hal ini juga diraih Kabupaten Gianyar dalam IKP terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi Bali terbaik Tingkat Provinsi se Indonesia. Kota Denpasar masih mampu dan mendapatkan nilai IKP tertinggi di Tingkat Kota secara Nasional Tahun 2023. Hal tersebut membuktikan masih terdapat keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2023

Peringkat	Kota	IKP	Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	95,80	17	Kota Padang Panjang	89,58
2	Kota Salatiga	94,20	18	Kota Ternate	89,51
3	Kota Bekasi	93,55	19	Kota Depok	89,47
4	Kota Solok	92,87	20	Kota Makasar	89,28
5	Kota Madiun	92,49	21	Kota Samarinda	88,97
6	Kota Surabaya	92,14	22	Kota Bontang	88,76
7	Kota Bukittinggi	91,78	23	Kota Jakarta Selatan	88,64
8	Kota Balikpapan	91,40	24	Kota Payakumbuh	88,56
9	Kota Semarang	91,31	25	Kota Kendari	88,34
10	Kota Magelang	91,18	26	Kota Padang	88,33
11	Kota Jakarta Pusat	91,00	27	Kota Batam	88,10
12	Kota Jakarta Barat	90,84	28	Kota Medan	87,80
13	Kota Bandung	90,46	29	Kota Gorontalo	87,59
14	Kota Jakarta Timur	90,21	30	Kota Tangerang Selatan	87,43
15	Kota Mojokerto	89,83	31	Kota Pangkal Pinang	87,42
16	Kota Pekanbaru	89,81	32	Kota Binjai	87,25

Sumber : Badan Pangan Nasional, IKP 2023

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan perhitungan dari Badan Pangan Nasional peringkat IKP Kota Tahun 2023 merupakan yang terbaik, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah **Kota Denpasar (95,80)**, Salatiga (94,20), Bekasi (93,55), Solok (92,87) dan Madiun (92,49). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 91,82.

Berdasarkan hal tersebut terjadi peningkatan realisasi sebesar 3,98 poin. Adanya peningkatan IKP Tahun 2023 dari tahun sebelumnya, Kota Denpasar masih mampu mendapatkan nilai IKP tertinggi di Tingkat Kota secara Nasional Tahun 2023. Hal tersebut membuktikan masih terdapat keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

8) Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana

Kota Denpasar merupakan daerah yang sangat rawan bencana yang diakibatkan oleh alam, non alam dan juga ulah manusia. Beberapa bencana pernah melanda di Kota Denpasar di antaranya banjir, kebakaran, gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin puting beliung, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan lain-lain. Cakupan pelayanan BPBD Kota Denpasar tersedia beberapa pos dan lokasi yang menyesuaikan dengan jangkauan pelayanannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana dan juga pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

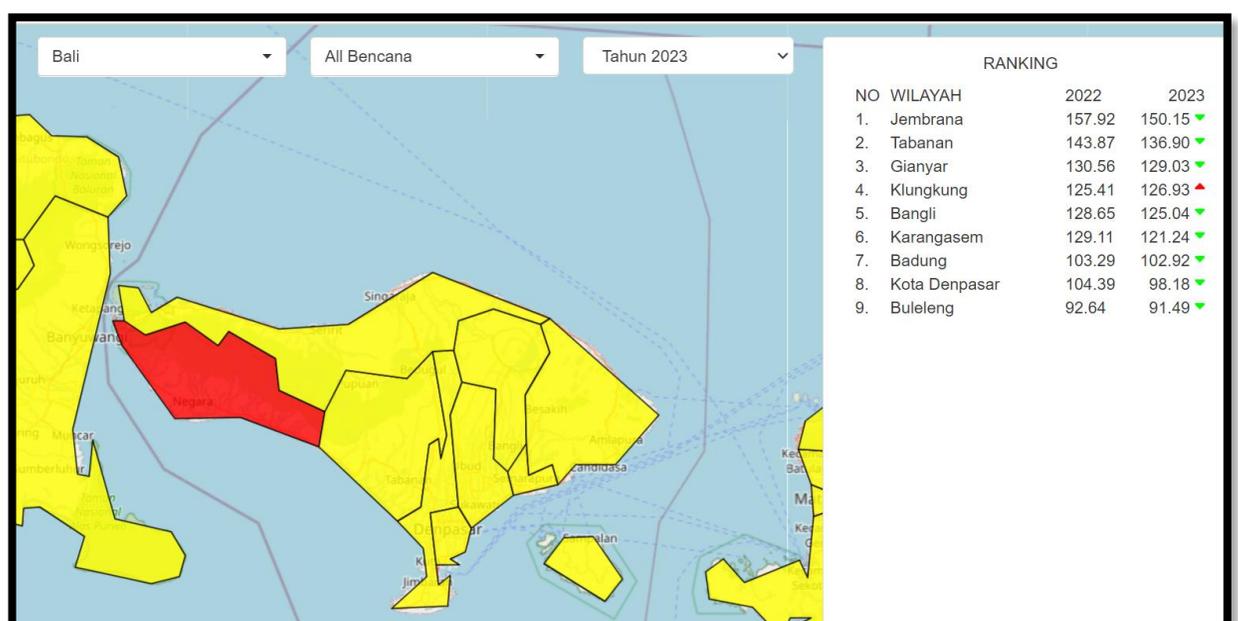
Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA									
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101.78	104.39	98.72	98.18	100.00547	90.1	99.91032186
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					100,005				

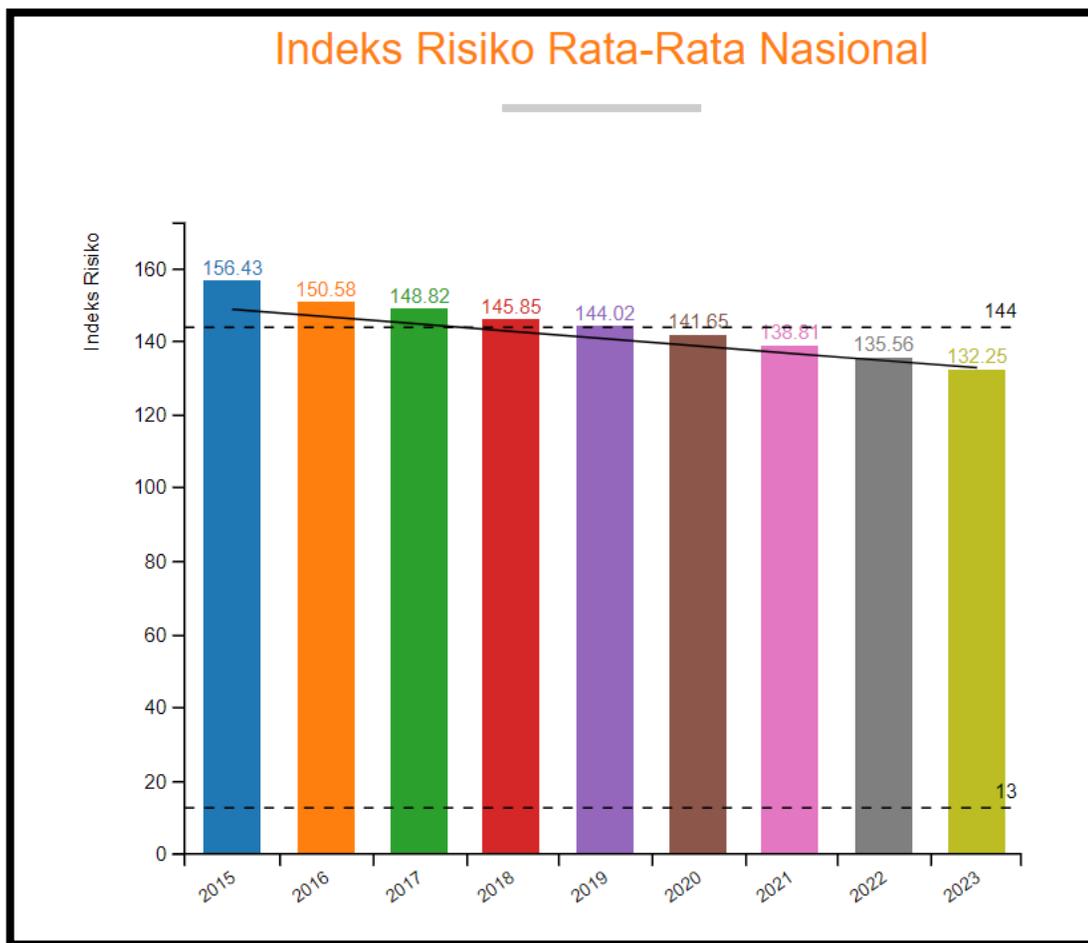
Dari Tabel diatas Indeks Resiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diketahui Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana yaitu 100,005 (Baik Sekali).

Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan melampaui target yakni dengan Indeks **98,18** dari target 98,72. Pada tahun 2022, capaian Indeks Resiko Bencana sebesar 104,39 turun menjadi 98,18 pada Tahun 2023.

Gambar 3.2 Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Provinsi Bali Tahun 2023



(Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, BNPB 2023)



(Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, BNPB 2023)

Dari Gambar diatas, Kota Denpasar pada Tahun 2023 memiliki Indeks Risiko Bencana yakni 98,18 masih dibawah Kabupaten Buleleng. Semakin kecil Indeks Risiko Bencana, maka semakin kecil risiko dan peluang terjadinya bencana, namun tetap siap dan memiliki upaya dalam pencegahan maupun penanganan bencana yang terjadi. Indeks Risiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2023, lebih kecil dengan indeks rata-rata nasional yakni 132,25. Semakin kecil Indeks Risiko Bencana semakin baik dalam penanggulangan bencana yang dilakukan.

Dalam meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar (BPBD) telah berupaya namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selain menurunkan resiko bencana adapun indikator dari BPBD adalah tingkat waktu tanggap/respon time rate, dimana dari target 15 menit. Tingkat waktu tanggap terhadap penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sangat baik dan sudah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana, sehingga indeks resiko bencana mencapai target yakni:

1. Menginventarisasi data-data pemenuhan 71 indikator dalam hal pengisian indeks ketahanan daerah, yang merupakan dasar dalam menentukan indeks risiko bencana.
2. Menyiapkan rancangan awal mengenai peraturan penanggulangan bencana di daerah.
3. Menyusun maupun memperbaharui dokumen-dokumen penanggulangan bencana yang ada.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal penanggulangan bencana melalui pelatihan.

Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

9) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang baik merupakan ukuran yang penting dalam reformasi birokrasi, maka dari itu upaya dalam perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Pelayanan Publik penting dan sangat terkait dengan mensejahterakan rakyat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan.

Untuk mewujudkan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan yang baik diharapkan hadir dalam

dengan masyarakat sehingga akan mencapai tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel. 3.16 Analisis Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK									
9	Rata-Rata SKM	Persen	87.66	88.77	88.16	91.9	104.2422868	89.66	102.498327
Rata-rata Capaian Kinerja 9 :					104,242				

Dari Tabel 3. Dapat diketahui bahwa pada tabel diatas untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat Indikator Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Indikator Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat capaiannya diperoleh dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Investasi, Kependudukan dan Kategori Perangkat Daerah Lainnya. Nilai rata-rata SKM Tahun 2022 adalah 88,77 dimana berdasarkan interval kepuasan masyarakat nilai tersebut masuk ke dalam kategori kinerja unit pelayanan baik (B). Pada Tahun 2023, Nilai rata-rata SKM adalah 91,90 (Sangat Baik).

Pada Tahun 2023, penilaian SKM dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yakni, 35 Perangkat Daerah, 10 Bagian di lingkungan Setda Kota Denpasar, 11 Puskesmas di Kota Denpasar, 43 Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.

Dari data tersebut sebanyak 67 perangkat daerah mendapatkan nilai Sangat Baik dan 32 perangkat Daerah mendapatkan nilai Baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Denpasar mencapai **91,90 (Sangat Baik)**.

Capaian Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 3,13%.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai pada perangkat daerah diharapkan baik dan mampu mendukung penilaian kinerja dari perangkat daerah tersebut. Rata-rata SKM Kota Denpasar dikukung dengan nilai SKM Perangkat Daerah yang memberikan hasil pada SKM Kota Denpasar. Dapat disimpulkan pelayanan di lingkungan Kota Denpasar baik.

Adapun realisasi capaian kinerja yakni 104,242 (Baik Sekali), Pemerintah Kota Denpasar tetap meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat maupun pengguna layanan.

Semua Perangkat Daerah diharapkan meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan baik berupa pemenuhan sarpras yang memadai dan inovasi yang mempercepat layanan bagi masyarakat maupun pengguna layanan.

10) Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar, inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu menciptakan *Sang Sewakadarma* agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja *Sewakadarma*. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mengandung arti bahwa pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. *Sang Sewakadarma* memiliki peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung yang dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sejak dibangunnya inovasi *Sang Sewakadarma* pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 10 orang agen perubahan yang disebut dengan *Sang Sewakadarma* dengan kategori 4 orang sebagai *Sang Sewakadarma Mahotama*, dan 6 orang sebagai *Sang Sewakadarma Utama*. Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 19 orang *Sang Sewakadarma*, dengan kategori 2 orang sebagai *Sang Sewakadarma Mahotama*, 12 orang *Sang Sewakadarma Utama*, 4 orang *Sang Sewakadarma Madya* dan 1 orang kategori *Sang Sewakadarma Pratama*. Di Tahun 2020 jumlah Agen Perubahan Kota Denpasar mengalami peningkatan dengan jumlah 13 orang *Sang Sewakadarma* dengan kategori Mahotama sebanyak 8 orang, kategori Utama sebanyak 3 orang dan kategori Madya sebanyak 2 orang. Pada Tahun 2022, jumlah *Sang Sewakadarma* sebanyak 6 orang

dengan kategori Mahotama. Pada Tahun 2023, jumlah Sang Sewakadarma masih 6 orang dengan kategori Mahotama.

Dengan adanya Sang Sewakadarma (agen perubahan) diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif di Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pengaruh yang baik terkait (good governance) di lingkungan Perangkat Daerah.

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI									
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	A (80,01)	BB (76,82)	96.01299838	A (80)	94.7125
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98,006				

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran memingkatnya kapasitas akuntabilitas adalah 98,006 (Baik). Dalam meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas didukung oleh 2 IKU yakni Predikat SAKIP dan Opini BPK.

Pada Tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar mendapatkan hasil 74,57. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar mendapat nilai 75,77 dengan predikat BB melebihi target yakni 75,50. Pada Tahun 2023, target dalam Perjanjian Kinerja Walikota dinaikkan menjadi 80,01 (A) namun hasil yang dicapai yakni **76,82**. Walaupun belum mencapai target, nilai SAKIP Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Target SAKIP Kota Denpasar Tahun 2023 sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yakni 76,45 dan capaian Tahun 2023 sebesar 76,82 yang telah mencapai target namun Komitmen Pimpinan dari Pemerintah Kota Denpasar sangat kuat untuk menargetkan SAKIP Kota Denpasar menjadi kategori A yakni 80,01 pada Tahun 2023.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan

yang berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar Pada Tahun 2023 telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2023, namun dari Tahun 2012 hingga tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 12 (dua belas) kali berturut-turut dari BPK.

Tujuan 4. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengurangi Pengangguran
- b. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi
- c. Meningkatnya Inovasi Daerah

11) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 dari tahun 2019-2021 menyebabkan sektor pariwisata yang menjadi andalan dari Provinsi Bali baik di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada sektor pekerjaan dan tingkat pengangguran saat tersebut. Tahun 2023, persentase tingkat pengangguran di Kota Denpasar akan disajikan pada table berikut:

Tabel 3.18 Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	4,11	3,94	2,52
Kab. Tabanan	3,94	3,83	2,64
Kab. Badung	6,93	6,87	2,72
Kab. Gianyar	6,90	6,78	2,96
Kab. Klungkung	5,35	1,96	1,29
Kab. Bangli	1,80	0,76	0,75
Kab. Karangasem	2,32	3,09	2,61
Kab. Buleleng	5,38	5,20	3,60
Kota Denpasar	7,02	5,08	2,85
Provinsi Bali	5,37	4,80	2,69

Sumber : BPS Bali, 2023

Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Mengurangi Pengangguran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN									
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03	5,08	4,18	2,85	100,3181818	6,62	100,5694864
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					100,318				

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mengurangi pengangguran Tahun 2023 terealisasi sebesar 100,318 (Baik Sekali). Target pada tahun 2022 menjadi 5,03 dari target 7,42 dikarenakan dalam jangka waktu tertentu perekonomian di Pemerintah Kota Denpasar bertahap pulih dan baik pasca pandemi covid-19. Mengingat Angka Pengangguran di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 7,02 pada tahun 2021 menjadi 5,08 persen pada Tahun 2022. Angka pengangguran Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar **2,85** melampaui target dari 4,18 namun capaian ini masih diatas dari Provinsi Bali. Semakin kecil persentase Tingkat pengangguran terbuka, semakin bagus hasil yang didapat.

Program yang mendukung tercapainya IKU (menurunnya tingkat pengangguran terbuka) tahun 2023, terdapat 3 program yakni Program Pelatihan keterampilan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Program Penempatan tenaga kerja, dan Program Hubungan Industrial. Program yang telah dilakukan dinas tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran di kota denpasar, dengan melakukan pelatihan keterampilan serta uji kompetensi bagi pencari kerja, memfasilitasi/mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja melalui BKOL/JOBFAIR dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis agar meminimalisir terjadinya PHK pegawai di Perusahaan.

Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Denpasar, yaitu dengan memaksimalkan kegiatan pelatihan keterampilan, memfasilitasi pemberi dan pencari kerja serta mensosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usi kerja (15 tahun keatas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Denpasar selama kurun waktu tiga tahun mengalami fluktuatif, memasuki Tahun 2020, TPAK Denpasar yakni 70,91% kemudian tahun 2021 menjadi 68,67%, Tahun 2022 yakni 72,37% dan **Tahun 2023 yakni 73,13%**. Dari TPAK kita dapat mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja bahwa pada tahun 2023 TPAK Kota Denpasar meningkat, sehingga angka angkatan kerja meningkat dan pengangguran semakin menurun. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia dapat dilihat melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dari Tahun 2018-2020 angka pengangguran terbuka Kota Denpasar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 yaitu 1,87% menjadi 7,62% pada Tahun 2020. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

TPT Kota Denpasar Tahun 2021 mengalami penurunan yakni 7,02% dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 5,08% dan pada Tahun 2023 turun menjadi **2,85%**. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian di Kota Denpasar berangsur-angsur pulih sehingga pengangguran semakin menurun.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengurangi pengangguran adalah :

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang
2. Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I. Mendorong agar setiap LPKS/SMK

menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.

4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

12) Sasaran Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemerintahan sangat massif dikarenakan oleh perkembangan zaman dan era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.

Pemerintah Kota Denpasar tentu tidak ketinggalan untuk turut serta dalam menerapkan SPBE di lingkungan Pemenrintah Daerah. Hasil Indeks SPBE Kota Denpasar bisa dilihat dari table berikut :

Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI									
13	Indeks SPBE	Indeks	3.5	3.68	3.7	3.8	102.7027027	3.9	94.35897436
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					102,702				

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran optimalnya pemanfaatan Teknologi adalah 102,702 (Baik Sekali). Indeks SPBE Kota Denpasar Tahun 2023 adalah **3,8** yang ditargetkan 3,7. Tahun 2021 Indeks SPBE Kota Denpasar sebesar 3,19 dengan predikat Baik meningkat menjadi 3,68 (Sangat Baik) pada Tahun 2022, dan Pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi **3,8**.

Pemerintah Kota Denpasar, telah menerapkan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, namun pada intinya perkembangan kondisi penerapan SPBE saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penerapan SPBE antara lain :

1. Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki acuan Peta Rencana SPBE yang menjadi referensi bagi tata kelola SPBE sehingga penerapan SPBE belum terpadu.
2. Secara umum SPBE sudah diterapkan di Kota Denpasar akan tetapi pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dipercepat dan dioptimalkan, hal ini terbukti dari masih belum optimalnya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai antar OPD walaupun sampai saat ini Kota Denpasar sudah menerapkan integrasi antar sistem dan berbagi data melalui Pusat Data Kota Denpasar akan tetapi perlu dipercepat dan diperluas.
3. Jangkauan infrastruktur TIK yang didalamnya juga termasuk infrastruktur SPBE ke seluruh wilayah Kota Denpasar dan ke semua lapisan masyarakat perlu dioptimalkan.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan SPBE untuk tahun 2021-2026 :

1. Peta Rencana Aplikasi
2. Peta Rencana Infrastruktur
 - Peta Rencana Infrastruktur Jaringan dan Keamanan
 - Peta Rencana Perangkat Komputer
3. Peta Rencana Tata Kelola dan Manajemen
4. Peta Rencana Program Peningkatan Kompetensi

Beberapa Inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar untuk mempercepat SPBE antara lain:

1. Adanya Portal Satu Data Kota Denpasar
2. Adanya Sistem Pemantauan Jaringan (SIPENJAR)
3. Mengefisienkan dan mengurangi sewa cloud dan mengoptimalkan

penggunaan Pusat Data Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo

4. Berkolaboratif dengan seluruh perangkat daerah sesuai indikator SPBE
5. Penerapan IDENTIK sebagai portal TTE
6. Mengoptimalkan pemanfaatan SP4N Lapor
7. Adanya Portal ASN Denpasar Integrated Virtual Office System (DIVOS)

13) Sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktikpraktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5				7	8
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH									
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif (55,68)	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (59,17)	98.61666667	Sangat Inovatif	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					98,616				

Dari tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran 98,616 (Baik Sekali) dan belum sesuai target yang telah ditetapkan. **Adapun Hambatan** yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penilaian indeks inovasi daerah dibagi menjadi dua yaitu: satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah. Turunnya nilai satuan pemerintah daerah pada indeks inovasi daerah pada beberapa indikator yaitu : Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah peningkatan investasi dan Peningkatan IPM dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai satuan pemerintah daerah kota denpasar adalah 52,5 sementara pada tahun 2023 hanya 48,25
2. Dokumen administrasi yang dimiliki inovasi yang bisa dilaporkan tidak mampu memenuhi nilai maksimal dari seluruh indikator yang ada, contohnya masih banyak inovasi yang regulasinya hanya SK Kepala Perangkat Daerah dan belum berupa SK Kepala Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah sehingga inovasi-inovasi tersebut tidak mampu memperoleh nilai maksimal dalam Indeks Inovasi Daerah 2023
3. Jumlah inovasi yang dilaporkan Kota Denpasar hanya berjumlah 59 inovasi yang berasal dari perangkat daerah Kota Denpasar, sebagai perbandingan Kabupaten Klungkung yang memperoleh kategori “sangat inovatif” melaporkan 83 inovasi

Langkah yang dilakukan dalam memenuhi target Indeks Inovasi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mengikuti sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri
2. Mensosialisasikan Indeks Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah se-Kota Denpasar
3. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam memenuhi satuan pemerintah daerah pada Indeks Inovasi Daerah 2023
4. Menghimpun inovasi perangkat daerah yang memenuhi persyaratan

dalam Indeks Inovasi Daerah 2023

5. Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan perangkat daerah pengampu inovasi dalam hal pemenuhan indikator-indikator yang dibutuhkan
6. Memverifikasi seluruh indikator dan data dukung yang dikirimkan perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan dalam pedoman Indeks Inovasi Daerah 2023.
7. Mengundang perangkat daerah pengampu inovasi untuk membahas terkait hasil verifikasi sementara serta berdiskusi terkait kendala dan solusi dalam pemenuhan indikator.
8. Menginput data dukung inovasi dalam setiap indikator yang terdapat dalam Indeks Inovasi Daerah 2023.

Inovasi dan Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi inovasi perangkat daerah yang akan dilakukan pada awal tahun 2024, kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi dokumen inovasi yang akan menjadi data dukung inovasi yang akan dilaporkan pada Indeks Inovasi Daerah 2024 serta Kegiatan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dilakukan untuk memotivasi perangkat daerah untuk membuat inovasi baru serta mengapresiasi inovasi yang telah terlaksana.

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan kajian-kajian baik dengan Universitas di Denpasar untuk serta pembinaan kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Kota Denpasar.

Kota Denpasar mendapatkan predikat “Kota Inovatif” pada Kategori Kota dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tujuan 5. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

14) Sasasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang baik dan andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa kontruksi yang berkualitas dan berkelanjutan, kondisi jalan yang baik di lingkungan Kota Denpasar, adanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi, drainase yang berfungsi normal, sistem sanitasi yang lancer dan terakses pada pengolahan limbah, rumah tangga yang mendapatkan akses air minum serta irigasi yang berfungsi normal.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 3.22

Tabel. 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR									
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59.58	58.92	60.47	72.54	119.9603109	64.86	111.8408881
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					119,960				

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian kualitas infrastruktur Denpasar Tahun 2023 yakni **72,54%** sudah melampaui target dari 60,47%. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah 119,960% (Baik Sekali).

Kualitas jalan lingkungan yang baik dan mantap sangat diperlukan, mengingat Kota Denpasar menjadi Ibu Kota Provinsi Bali dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi serta mobilitas masyarakat ke Kota Denpasar tinggi. Masalah kemantapan jalan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemantapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kualitas infrastruktur yakni dalam menjalankan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur serta kemampuan penyusunan rencana strategis dan

rencana kerja PD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Solusi dan Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian kualitas infrastruktur yakni meningkatkan kinerja pemerintahan dengan cara percepatas proses komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur, mengoptimalkan SDM yang ada dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan, meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

15) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus sebagai berikut.

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Keterangan:

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2023 diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 50,83) + (0,405 \times 82,2) + (0,219 \times 29,11) \\ &= 19,11 + 33,29 + 6,38 \\ &= 58,78 \end{aligned}$$

Nilai IKLH Tahun 2023 tersebut telah mengacu pada hasil perhitungan pada aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar, sedangkan penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level pusat diinput langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian passive sampler dan hasil pengukuran alat Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk perhitungan IKU dan data RTH yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2023 sebesar 50,83 untuk IKA; 82,20 untuk IKU; dan 29,11 untuk IKTL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar 58,78 dan termasuk dalam kriteria sedang.

Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5			7	8	
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.91	58.71	61.95	58.78	94.88297014	62.13	94.60807983
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					94,882				

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH Tahun 2023 yaitu sebesar 61,95, maka nilai capaian IKLH sebesar 58,78 tersebut belum mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 94,88%. Hal ini dapat terjadi mengingat menurunnya kualitas udara di Kota Denpasar Tahun 2023, masih kurangnya kualitas tutupan lahan, dan kondisi sebagian besar sungai di Kota Denpasar masih berada dalam kategori tercemar, baik tercemar ringan maupun sedang.

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2023 sebesar 72,48 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 71,38 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 58,78 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya

peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Adapun penjabaran mengenai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coliform. Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2023 pada website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Adapun pengujian kualitas air sungai tahun 2023 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (PT. Unilab Perdana). Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret 2023 dan Juli 2023. Selain menggunakan data hasil uji kualitas air sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 pada 30 (tiga puluh) titik lokasi tersebut, perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2023 juga menggunakan data hasil uji kualitas air sungai pada 4 (tiga) titik lokasi di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh KLHK RI dengan tiga kali pengambilan contoh uji masing-masing pada bulan Juli, September dan Nopember 2023 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2023 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
1.	Tukad Badung	Hulu	Dam Mertegangga (Desa Ubung Kaja)
		Tengah	Jalan Pulau Biak Denpasar
		Hilir	Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap)
2.	Tukad Ayung	Hulu	Jl. Dam Peraupan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps)
		Tengah	Jl. Noja Saraswati, Oongan

		Hilir	Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden)
3.	Tukad Teba	Hulu	Jl. Gatsu Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Aston)
		Tengah	Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegal Kerta)
		Hilir	Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod)
4.	Tukad Mati	Hulu	Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja
		Tengah	Br. Monang maning Ds. Tegal Harum (Jl. Mahendradatta)
		Hilir	Br. Umadui Ds. Padangsambian Kelod
5.	Tukad Loloan	Hulu	Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon)
		Tengah	Jl. Penyaringan, Sanur
		Hilir	Jl. Tanjung, Sanur
6.	Tukad Rangda	Hulu	Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer
		Tengah	Jl. Tukad Badung XX, Gang I (DAM)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel Sesetan (dekat jembatan)
7.	Tukad Punggawa	Hulu	Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi)
		Tengah	Jl. Tukad Yeh Aya, Kel. Renon (dekat Moena Fresh)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. SEsetan (depan titilestari)
8.	Tukad Ngenjung	Hulu	Jl. Tukad Balian Gg. IX
		Tengah	Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan Pura)
9.	Tukad Bindu	Hulu	Jl. Gatsu Timur Kel. Tonja
		Tengah	Jl. Surabi
		Hilir	Jl. Sedap Malam
10.	Tukad Guming	Hulu	Jl. Antasura Gg. Dewi Madri
		Tengah	Jl. Seroja Gg. Belimbing
		Hilir	Jl. Kecubung I (dekat kantor Dinas SatPol PP)

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 50,83. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $50 \leq x < 70$. Berdasarkan kondisi demikian perlu dilakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menggalakkan upaya pengendalian pencemaran air, salah satunya melalui Program Kali Bersih (Prokasih) dengan tidak membuang sampah serta limbah hasil industri maupun rumah tangga yang tidak diolah ke sungai.

Tabel 2
Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah	Presentase Pemenuhan (%)	Bobot	Indeks Kualitas Air (IKA)
1	Memenuhi	6	8,33%	70	5,83
2	Tercemar Ringan	63	87,50%	50	43,75
3	Tercemar Sedang	3	4,17%	30	1,25

4	Tercemar Berat	0	0%	10	0
				Jumlah	50,83

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, 2023

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode passive sampler dan hasil pengukuran alat Air Quality Monitoring System (AQMS) yang merupakan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang ditempatkan di Taman Lumintang, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara. Untuk pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode passive sampler, pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Jalan Gajah Mada), area industri (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat passive sampler telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan passive sampler dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel 3, sedangkan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3
Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Jalan	Lokasi Sampel	Metode Pemantauan	Koordinat	
				Lattitude	Longtitude
1	Jl. Gajah Mada	Transportasi	Manual Passive	-8.6558286	115.2128046
2	Jl. Hang Tuah Sanur	Industri/ Agro Industri	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
3	Jl. Gunung Galunggung	Pemukiman	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
4	Jl. Majapahit, No.6	Perkantoran/ Komersial	Manual Passive	-8.637113	115.211341
5	Taman Lumintang	-	Otomatis (AQMS)	-8.6355	115.212279

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023

Tabel 4
Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023

Parameter	Hasil pemantauan	Baku mutu	Indeks Dibagi Baku Mutu
NO2	14,66	40	0,37
SO2	9,48	20	0,47
Rataan Indeks			0,42
Indeks Kualitas Udara			82,20

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 82,20. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor $70 \leq x < 90$.

Indeks Kualitas Lahan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas lahan adalah indeks kualitas lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu:

$$IKTL = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,11. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 29,11. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$.

Program:

Berikut nama-nama program APBD 2023 yang mendukung pencapaian IKLH:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Permasalahan/ kendala

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai, kinerja IPAL yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai, adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, masih adanya masyarakat yang membakar sampah, dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, adanya alih fungsi lahan, kurangnya peremajaan pohon perindang.

Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

Inovasi

Untuk meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumbernya maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengembangkan suatu inovasi yang dikenal dengan nama “Vasudhaiva Kutumbakam menuju Denpasar Bersih Selasa Jumat Anorganik (Denpasar Bersalju)”. Inovasi tersebut merupakan Gerakan Bersama pengelolaan sampah dengan berlandaskan spirit kebersamaan dan semangat gotong royong sehingga nantinya diharapkan semakin banyak masyarakat yang aktif dalam mengelola

sampah yang dihasilkan mulai dari memilah, mengolah, menabung sampah, dan membuang sampah yang sudah terpilah sesuai jadwal pembuangan sampah yaitu Selasa dan Jumat untuk sampah anorganik dan hari lainnya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) untuk sampah organik. Selain untuk mengurangi beban operasional di TPS 3R dan TPST, hal tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mewujudkan circular economy di Kota Denpasar.

Foto Kegiatan



(a)



(b)

Gambar (a) Kegiatan Penganjangan Taman Kehati, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 di Lahan Kosong Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar, (b) Pelaksanaan Aksi Nyata dan Komitmen Pemilahan Sampah Berbasis Sumber, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar

Penghargaan

Adapun penghargaan/ prestasi yang diraih Kota Denpasar terkait pengelolaan lingkungan hidup selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Penghargaan Adiwiyata

Tahun 2023 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak satu sekolah yaitu SMP Widya Sakti Denpasar, sedangkan untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional sebanyak dua sekolah yaitu SDN 2 Tonja dan SD Hainan School. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim)

Untuk tahun 2023, Kota Denpasar berhasil mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Proklim Utama untuk Desa

Padangsambian Kaja dan Sertifikat Proklamasi Madya untuk Kelurahan Kesiman, Desa Tegal Harum, dan Kelurahan Padangsambian.

16) Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Pada tingkat nasional, penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu Culture for Development Indicators (CDIS). Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan, dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator penyusunan indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Dalam hal ini, IPK bukan mengukur nilai budaya tetapi lebih memotret capaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Berkenaan dengan penghitungan Indeks Kebudayaan Kota Denpasar, pada saat ini terdapat 3 (tiga) model penghitungan, yaitu penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional (Handbook IPK, 2018), penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bali dan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar.

Penyusunan IPK Kota Denpasar perlu dilakukan untuk mengukur pembangunan kebudayaan yang berlangsung di Kota Denpasar. Tidak tersedianya data yang sama seperti yang dipergunakan untuk menyusun IPK Nasional menjadi kendala utama dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, sesuai dengan pedoman dan arahan penyusunan IPK Nasional. Penyusunan IPK secara nasional dilakukan pada tahun 2018 adalah dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga.

Pada saat ini, data yang sesuai dengan pedoman penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut, tidak tersedia di Kota Denpasar. Untuk dapat menyusun IPK Kota Denpasar, maka dibuat pengukuran dengan data yang tersedia, dengan tetap mengacu dari IPK nasional dan indikator penjabaran misi RPJMD Provinsi Bali. Dari tiga model tersebut, atas dasar pertimbangan sifatnya yang temporer serta ketersediaan data, maka metode

yang paling mungkin untuk dipilih (feasible) adalah yang ketiga atau Penyusunan IPK Kota Denpasar berbasis data yang tersedia. Oleh sebab itu, apapun hasilnya pada saat ini, masih akan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan ketersediaan data yang ada.

Sangat disadari, karena IPK ini disusun berdasar data yang tersedia tentang kondisi spesifik Kota Denpasar, maka IPK ini tidak dapat diperbandingkan/disamakan dengan IPK daerah lain. Namun demikian, IPK yang Penghitungan IPK Kota Denpasar 15 disusun ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di bidang kebudayaan Kota Denpasar, antar waktu, selama indikator yang dipergunakan datanya tersedia secara continuous atau time series.

Model Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIS) dengan menempatkan 'kebudayaan' sebagai salah satu indikator untuk mendukung pencapaian misi 5 RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Meskipun IPK Kota Denpasar yang disusun hanya berlaku bagi Kota Denpasar, namun tetap mengacu pada IPK Nasional.

Sesuai dengan pedoman yang ada dalam perhitungan IPK Nasional, metode yang digunakan dalam menghitung IPK Kota Denpasar, terdiri dari 5 (lima) tahap:

1. Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK

Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan indikator yang dinilai relevan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di Kota Denpasar. Indikator yang dipilih berdasarkan ketersediaan data dan yang dijadikan sebagai alat ukur oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan IPK Kota Denpasar tidak digunakan indikator yang sama dengan indikator IPK Nasional yang menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga dan dilakukan pengumpulan datanya melalui survei. Dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, karena keterbatasan waktu dan biaya saat pengumpulan Penghitungan IPK Kota Denpasar 16 data, tidak dilakukan melalui survei rumah tangga. Untuk itu, digunakan data yang tersedia pada perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi kebudayaan.

2. Proses Seleksi Indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator mana saja yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Pemetaan dan proses seleksi indikator terhadap penyusunan IPK dilakukan dengan mengkaji ulang semua indikator yang dikumpulkan, selanjutnya dipilih indikator yang sesuai dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Data-data ini kemudian diseleksi untuk dilihat keterkaitannya dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Pertimbangan dalam proses seleksi ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu.

3. Indikator Hasil Seleksi

Melalui proses seleksi terhadap data-data yang ada, diperoleh sejumlah data yang mencerminkan indikator dari 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Dalam proses ini diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih. Indikator terpilih ini akan digunakan untuk menentukan skor masing-masing dimensi IPK.

4. Normalisasi Indikator

Setelah melalui proses seleksi dan diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih, data-data ini masih bervariasi satuannya sehingga perlu Penghitungan IPK Kota Denpasar 17 dilakukan proses pengolahan lebih lanjut, yaitu normalisasi data. Tujuan normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama sebagai standarisasi. Pada tahap pertama dilakukan validasi data terlebih dahulu, kemudian dilakukan penghitungan rata-rata. Normalisasi data dilakukan melalui pemberian skor, dengan tujuan untuk menyamakan ukuran data. Dengan memperbandingkan data dengan rata-ratanya maka dapat dibuat skor secara gradual sebagai berikut: - skor 1 jika lebih kecil dari rata-rata; - skor 3 jika besarnya sama dengan rata-rata; - skor 5 jika lebih besar dari rata-rata. (nilai skor ini berlaku untuk indikator yang baik/positif; untuk indikator yang negatif seperti konflik sosial, maka skor ini berlaku sebaliknya).

5. Penentuan Bobot Tiap Dimensi

Penentuan bobot bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan secara relatif terhadap dimensi lain. Pertimbangan dalam proses penentuan bobot ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para ahli tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Penilaian para pakar adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan para pakar terkait suatu aspek tertentu dalam mengukur indeks.

Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN									
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66.97	63.85	68.54	68.47	99.89786986	74.84	91.48850882
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					99,897				

Penghitungan IPK Kota Denpasar dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap setiap indikator pembentuk IPK.

- Membuat nilai rata-rata capaian time series selama 5 tahun (2016-2020) atau sesuai data yang tersedia, dirata-rata dan dianggap sama dengan rata-rata 5 tahun.
- Hasil pemberian skor masing-masing indikator setiap tahun kemudian dijumlah. Jumlah skor indikator pada tahun 2018 digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan skor IPK Kota Denpasar.
- Oleh karena IPK Nasional untuk Provinsi Bali yang tersedia adalah IPK tahun 2018, maka IPK ini digunakan sebagai angka acuan/dasar perhitungan. Kemudian untuk konversi target yang direncanakan menggunakan formula sebagai berikut:

$$IPK \text{ Kota Denpasar} = \frac{\text{Total skor target Kota Denpasar tahun } t}{\text{Total skor Kota Denpasar tahun 2018}^*) \times IPK \text{ Bali tahun 2018}$$

^{*)} Total skor Kota Denpasar tahun 2018 = IPK Denpasar 2018 = IPK Bali 2018

Berdasarkan hasil pendataan ulang pada tahun 2023, terdapat banyak indikator IPK Kota Denpasar yang mengalami penyesuaian, termasuk updating data dari dinas terkait. Hasil perhitungan IPK Kota Denpasar pada saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan menggunakan data yang tersedia saat itu sebagai berikut:

- IPK Kota Denpasar tahun 2018 berdasarkan hasil konversi skor indikator tahun 2018 adalah sama dengan IPK Provinsi Bali = 65,39, sementara IPK Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020 masing-masing 63,85 dan 54,62.

IPK	Realisasi <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>		
	2018	2019	2020
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	65,39	63,85	54,62

Terjadi penurunan IPK tahun 2020 dan 2021 disebabkan beberapa indikator menurun capaiannya akibat pandemi covid-19, seperti pembatasan pertunjukan seni budaya serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

- Target IPK Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 berdasarkan data yang tersedia saat itu dan hasil penghitungan IPK tahun 2023-2026 sebagai berikut:

IPK	Target <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	66,97	68,54	68,54	74,84	74,84

Sementara itu, berdasarkan updating data indikator IPK Kota Denpasar yang dilakukan pada tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan data serta satuan indikator. Hal ini dikarenakan perangkat daerah mengalami kesulitan dalam mengukur serta mengumpulkan data tersebut, sehingga perlu direkap ulang dan dilakukan penghitungan kembali. Berikut hasil penghitungan IPK Kota Denpasar berdasarkan updating data tahun 2023:

- Berdasarkan hasil penghitungan IPK Kota Denpasar dengan menggunakan data yang sudah dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022, menunjukkan IPK Kota Denpasar tahun 2019 sampai dengan 2022

mengalami perbedaan dengan hasil hitungan IPK saat penyusunan dokumen RPJMD.

- Skor IPK Kota Denpasar pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 namun belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari data indikator pada dimensi ekspresi budaya yaitu Jumlah Pelaku Seni yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dan indikator pada dimensi ketahanan sosial budaya, yaitu Jumlah Kejadian Konflik Sosial yang mengalami kenaikan kejadian.
- Jika dilihat dari target IPK Kota Denpasar tahun 2023, hasil hitungan saat penyusunan RPJMD Kota Denpasar menunjukkan angka 68,54, sementara berdasarkan hasil realisasi kinerja tahun 2023 menunjukkan angka **68,47**. Belum tercapainya target ini juga dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran data sehingga berpengaruh pada penilaian atau skoring pada beberapa indikator.

Faktor yang mempengaruhi Penyusunan IPK Kota Denpasar

Optimalisasi upaya pelestarian kebudayaan (pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) dapat dilaksanakan dengan memetakan potensi masalah serta mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran IPK Kota Denpasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut antara lain adalah:

- Indikator IPK Kota Denpasar tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026, untuk mewujudkan misi kelima, sehingga harus dilaksanakan;
- Kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke sistem online (daring);
- Adanya kebijakan dalam hal prioritas pendanaan saat pandemi, sehingga penyelenggaraan festival, lomba seni-tradisi dan fasilitasi seni budaya yaitu tetap dilaksanakan (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring, untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat. Selain itu juga terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat;
- Tahun 2023 sudah mulai kembali aktivitas masyarakat seiring pemulihan pasca covid-19;

- Selain faktor di atas, dalam hal ketersediaan data dukung IPK Kota Denpasar, belum seluruh potensi budaya yang ada terdata dengan rapi secara kontinu agar lebih valid. Saat ini, data pendukung IPK Kota Denpasar dianggap kurang penting sehingga data yang tersedia tidak berkelanjutan (continuous);
- Perlu ada ada pendataan ulang untuk indikator yang belum tersedia lengkap datanya sehingga menjadi lebih valid

Rekomendasi ke depan mengenai penyusunan indeks kebudayaan ini ada beberapa pilihan/alternatif:

- 1) Tetap seperti sekarang, dengan cara melanjutkan metode yang dilakukan saat ini dan pemutakhiran data secara rutin; atau
- 2) Mempertajam penghitungan IPK dengan perubahan, dalam hal ini akan menjadi kuat alasannya sejalan dengan beberapa momentum perubahan ke depan pada tahun 2025 sebagai waktu integrasi sistem pemerintahan dan perencanaan yang terpadu (Pilkada/pelantikan kepala daerah serentak, tahun mulai yang sama untuk RPJP, RPJM, RKP dan turunannya). Adapun perubahan yang dilakukan dengan cara:
 - Mengikuti dan menyesuaikan dengan variabel nasional, dengan melakukan penambahan kegiatan pendataan yang memadai, atau
 - Menguatkan dimensi lokal dengan merumuskan variabel pengukuran yang diturunkan dari Peraturan Daerah secara lokal dan penambahan kegiatan pendataan secara memadai.

Solusi yang dilakukan agar IPK Kota Denpasar mencapai target dan meningkat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemahaman terhadap seni budaya di lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.
2. Pembinaan kesenian dan kebudayaan di tiap banjar di Kota Denpasar
3. Pemberian insentif bagi kelompok-kelompok kesenian untuk terus mengembangkan seni budaya
4. Membuat lomba-lomba kesenian untuk segala kelompok umur sehingga meningkatkan cinta seni budaya dari sejak dini.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan pagu sebesar Rp 859.861.940.328,00 dan realisasi belanja atas pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 728.039.508.395,00 dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	288.614.855.588,00	257.154.644.219,00	89,099
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	118.629.132.392,00	99.650.782.861,00	84,001
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	9.781.015.992,00	9.492.879.154,00	97,504
4	Mengurangi Kemiskinan	5.421.610.061,00	4.899.810.640,00	90,375
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	864.602.022,00	779.043.705,00	90,104
6	Menurunnya kasus kriminalitas	1.247.179.657,00	982.937.864,00	78,812
7	Meningkatkan ketahanan pangan	4.843.131.881,00	4.285.545.505,00	88,487
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	1.916.800.706,00	1.349.481.579,00	70,402
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	30.210.116.081,00	10.108.391.415,00	33,460
10		25.687.587.043,00	14.963.350.298,00	58,271

	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			
11	Mengurangi Pengangguran	6.464.795.990,00	6.293.057.350,00	97,343
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	3.239.829.928,00	2.465.800.847,00	76,108
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	855.849.091,00	770.708.774,00	90,051
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	222.310.136.043,00	198.750.657.291,00	89,402
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	94.737.986.457,00	73.147.315.615,00	77,210
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	45.046.311.396,00	42.945.101.278,00	95,335
	TOTAL	859.861.940.328,00	728.039.508.395,00	84,669

Sumber : BAPPEDA dan BPKAD Kota Denpasar 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.26 diatas dapat diketahui persentase realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 84,67% meningkat sebesar 1,94% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022 yang sebesar 82,73 %. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel dibawah.

Tabel 3.26 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
MISI 1					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	99,614	257.154.644.219,00	89,099

2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,172	99.650.782.861,00	84,001
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	96,734	9.492.879.154,00	97,504
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,667	4.899.810.640,00	90,375
MISI 2					
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,268	779.043.705,00	90,104
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	99,545	982.937.864,00	78,812
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	102,241	4.285.545.505,00	88,487
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	100,005	1.349.481.579,00	70,402
MISI 3					
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	104,242	10.108.391.415,00	33,460
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	98,006	14.963.350.298,00	58,271
MISI 4					
11	Mengurangi Pengangguran	1	100,318	6.293.057.350,00	97,343
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	102,702	2.465.800.847,00	76,108
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	98,616	770.708.774,00	90,051
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	119,960	198.750.657.291,00	89,402
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	94,882	73.147.315.615,00	77,210
MISI 5					
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	99,897	42.945.101.278,00	95,335

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2023 (Data diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.27 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 (enam belas) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% belum ada. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	99,614	89,099	10,515
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,172	84,001	16,171
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	96,374	97,504	-1,13
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,666	90,375	9,291
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,268	90,104	10,164
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	99,545	78,812	20,733
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	102,241	88,487	13,754
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	100,005	70,402	29,603
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	104,242	33,460	70,782

10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	98,006	58,271	39,735
11	Mengurangi Pengangguran	1	100,318	97,343	2,975
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	102,702	76,108	26,594
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	98,616	90,051	8,601
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	119,960	89,402	30,558
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	94,882	77,210	17,672
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	99,897	95,335	4,562

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.27, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran menuju tingkat efisiensi namun belum maksimal dan telah terdapat beberapa efisiensi.

1. Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan tercapainya capaian kinerja 99,614 persen dicapai dengan realisasi anggaran 89,099 persen.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan tercapainya capaian kinerja 100,172 persen dicapai dengan realisasi anggaran 84,001 persen.
3. Sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dengan tercapainya capaian kinerja 96,374 persen dicapai dengan realisasi anggaran 97,504 persen.
4. Sasaran mengurangi kemiskinan dengan tercapainya capaian kinerja 99,666 persen dicapai dengan realisasi anggaran 90,375 persen.
5. Sasaran meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA dengan tercapainya capaian kinerja 100,268 persen dicapai dengan realisasi anggaran 90,104 persen.
6. Sasaran menurunnya kasus kriminalitas dengan tercapainya capaian kinerja 99,545 persen dicapai dengan realisasi anggaran 78,812 persen.
7. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan tercapainya capaian kinerja 102,241 persen dicapai dengan realisasi anggaran 88,478 persen.
8. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana dengan tercapainya capaian kinerja 100,005 persen dicapai dengan realisasi anggaran 70,402 persen.

9. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan tercapainya capaian kinerja 104,242 persen dicapai dengan realisasi anggaran 33,460 persen.
10. Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan tercapainya capaian kinerja 98,006 persen dicapai dengan realisasi anggaran 58,271 persen.
11. Sasaran mengurangi pengangguran dengan tercapainya capaian kinerja 100,318 persen dicapai dengan realisasi anggaran 97,343 persen.
12. Sasaran optimalnya pemanfaatan teknologi dengan tercapainya capaian kinerja 102,702 persen dicapai dengan realisasi anggaran 76,108 persen.
13. Sasaran meningkatnya inovasi daerah dengan tercapainya capaian kinerja 98,616 persen dicapai dengan realisasi anggaran 90,051 persen.
14. Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dengan tercapainya capaian kinerja 119,960 persen dicapai dengan realisasi anggaran 89,402 persen.
15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tercapainya capaian kinerja 94,882 persen dicapai dengan realisasi anggaran 77,210 persen.
16. Sasaran meningkatnya pembangunan kebudayaan dengan tercapainya capaian kinerja 99,897 persen dicapai dengan realisasi anggaran 95,335 persen.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023. LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- 9 indikator atau 53% kategori Baik Sekali dan melampaui target;
- 7 indikator atau 41% kategori Baik;
- 1 indikator atau 6% kategori Baik (Data masih menggunakan tahun 2022, dikarenakan belum rilis BPS);

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja Tahun Pertama yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator dengan capaian kinerja Baik Sekali karena melampaui target, 7 (tujuh) Indikator dengan capaian kinerja Baik, 1 (satu) Indikator dengan capaian kinerja Baik namun masih memakai data tahun 2022 karena belum rilis dari BPS. Terhadap target kinerja yang masih dalam kategori Baik, telah dilakukan analisis permasalahannya serta solusi perbaikannya sebagaimana tercantum pada analisis capaian masing-masing indikator kinerja.



Denpasar, 28 Maret 2024

Walikota Denpasar,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Denpasar, 9 Januari 2023
WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan		Indeks	0.779
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup		Tahun	75.46
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita		Rupiah	2.422.121
4	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan		Persen	2.01
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA		Persen	89.34
6	Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)		Angka	105.63
7	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		Indeks	93.7
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana		Indeks	98.72
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM		Persen	88.16
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Predikat SAKIP	Predikat	A 80.01
		2	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	4.18

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
1		2	3	4
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	Indeks	3.7
13	Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	60.47
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.95
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68.54

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 2.359.997.001.430 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)



WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PENGHARGAAN DIRAIH PEMKOT DENPASAR
2023**

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN	OPD
1	JANUARI (12/1)	Astra Coporate Affairs (CA) Award 2022	PT. Astra International Tbk.	Pemerintah Kota Denpasar melalui Dekranasda dan Dinasa Perindag Kota Denpasar telah berhasil melakukan pembinaan dengan baik terhadap pengerajin UKM Lorakaca, sehingga dapat memanfaatkan kain perca untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan memberdayakannya.	Disperindag dan Dekranasda
2	PEBRUARI (27/2)	Penghargaan Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2022	Kementerian PPA RI	Pemerintah Kota Denpasar sangat berkomitmen dalam perlindungan, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.	Dinas P3AP2KB
3.	MARET (1/3)	Penghargaan PPP Promotor of the Year	PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)	Pemerintah Kota Denpasar mampu mencari alternatif pembiayaan infrastruktur atas keterbatasan anggaran di Kota Denpasar. Proyek pertama yang diusung melalui skema KPBU adalah revitalisasi dan pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ).	Dinas PU
4.	MARET (1/3)	Penghargaan Indeks Ketahanan Pangan Terbaik I Nasional Tahun 2022	Badan Pangan Nasional	Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 memperoleh penghargaan sebagai apresiasi terhadap perolehan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Terbaik, dari 5 Kota yang mendapat penghargaan. Dimana, Pemkot Denpasar Peringkat I Kota Denpasar dengan IKP 91,82.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
5.	MARET (10/3)	Penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi	Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI	Terpilihnya Kota Denpasar sebagai penerima Anugerah Prakarsa Inklusi tidak terlepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas serta penganggarannya.	Dinas Sosial
6.	MARET (15/3)	Penghargaan UHC	Wakil Presiden RI	Pemkot Denpasar meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah.	Dinas Kesehatan
7.	MARET (16/3)	Penghargaan Penurunan Stunting	Pemerintah Provinsi Bali	Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Denpasar karena sebagai daerah tingkat prevalensi stunting terendah di Provovinsi Bali berdasarkan hasil studi Status Gizi Indonesia (SGI).	Dinas P3AP2KB

8.	MARET (16/3)	APBD AWARD	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Kota Denpasar mampu dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan memperhatikan percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi , penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem.	BPKAD
9	MARET (20/3)	DIGITAL GOVERNMENT AWARD (Kategori Penguatan Kebijakan SPBE)	MENPAN dan RB	Pemerintah Kota Denpasar komitmen mendukung percepatan pelayanan berbasis elektornik dan digitalisasi.	Kominfo
10	MARET (20/3)	PENGHARGAAN PPKM AWARD 2023 TINGKAT NASIONAL	PRESIDEN RI	Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah berhasil melakukan Pengelolaan Vaksinasi Covid 19 Terbaik tingkat nasional.	Puskesmas I Denpasar Selatan
11	APRIL (29/4)	PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERKINERJA TINGGI SECARA NASIONAL.	Kementerian Dalam Negeri RI	Pemerintah Kota Denpasar telah bersungguh sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.	Tapem/Prokopim
12	MEI (9/5)	PENGHARGAAN WTP 11 KALI	BPK Perwakilan Bali	Pemerintah Kota Denpasar sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Dimana, khusus untuk Kota Denpasar kembali meraih WTP untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.`	Inspektorat
13	MEI (16/5)	PENGHARGAAN DIGITALISASI KEPEGAWAIAN. ARSIP	Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	penghargaan yang didapat Pemkot Denpasar melalui BKPSDM kali ini. Mengingat di era sekarang, digitalisasi menjadi hal yang sangat penting, pencapaian kali ini dimana digitalisasi Arsip Kepegawaian Kota Denpasar dengan presentase capaian 88,04 % per 31 Maret 2023 harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai 100 %.	BKPSDM

14.	JUNI (16/6)	SMART SANITATION AWARD	Pemerintah Kabupaten Bandung	Pemerintah Kota Denpasar telah mampu mewujudkan sanitasi bukan saja infrastruktur tetapi juga bagaimana dapat mengubah pola pikir serta pola hidup masyarakat sebagai Agent of Change. Pemenuhan akses sanitasi harus melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah.	Dinas PU
15	JULI (21/7)	DAFA AWARD	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Forum Anak Denpasar mengembangkan berbagai kegiatan dalam melaksanakan peran mereka sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.	Dinas P3AP2KB
16	JULI (21/7)	KOTA LAYAK ANAK KATAGORI UTAMA	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Pemerintah Kota Denpasar telah mampu mewujudkan rasa aman pada anak.	Dinas P3AP2KB
17	JULI (27/7)	ASKOMPSI AWARD	Kementerian Dalam Negari	Penghargaan Sekreariat Kota Terbaik Pertama Kota se-Indonesia Digital Leadership Government Awards (DLGA) Tahun 2023 untuk Kategori Collaboration dan Engagement dari Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI). Penghargaan ini karena telah menerapkan pelayanan digital.	Diskominfo
18	AGUSTUS (15/8)	UPAKARYA WANUA NUGRAHA	Kementerian Dalam Negeri RI	Bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras Walikota dalam memimpin dan mengembangkan kota Denpasar menjadi pusat perkotaan yang berkelanjutan dan berkualitas	BPMD
19	AGUSTUS (15/8)	JUARA I LOMBA DESA TINGKAT REDIONAL	Kementerian Dalam Negeri RI	Desa Tegal Harum berhasil laksanakan berbagai macam terobosan dan inovasi kreatif yang muaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Tegal Harum.	Desa Tegal Harum
20	AGUSTUS (28/8)	JUARA III ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA (ADWI)2023	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)	Kelurahan Serangan mampu mebangkitkan ekonomi masyarakat melalui program desa wisata.	Kelurahan Serangan.
21	SEPTEMBER (26/9)	PENGHARGAAN IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan komitmen untuk NSPK	BKPSDM
22	SEPTEMBER (26/9)	MANAJEMEN ASN	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil melaksanakan manajemen ASN sesuai aturan yang ada.	BKPSDM.

23	SEPTEMBER (26/9)	PENGHARGAAN CAPAIAN KEBUTUHAN DAN MUTASI PEGAWAI	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemkot Denpasar telah berhasil melaksanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan pegawai.	BKPSDM.
24	OKTOBER (3/10)	PENGHARGAAN TERBAIK II PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (P2DD) WILAYAH JAWA BALI.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pemerintah Kota Denpasar telah mampu menekan laju inflasi melalui penerapan digitalisasi.	Bagian Ekonomi
22	OKTOBER (12/10)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award	Kementerian Hukum dan HAM RI	Pemerintah Kota Denpasar berhasil mengelola JDIHN dengan kinerja yang baik.	Bagian Hukum
23	NOPEMBER (22/11)	Penghargaan 45 KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)	Kementerian PAN dan RB	Pemerintah Kota Denpasar masuk dalam katagori kota inklusi	Kominfo
24	NOPEMBER (29/11)	Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba Wistara Katagori Tertinggi	Kementerian Kesehatan RI	Kota Denpasar telah berhasil mengimplementasikan 9 (sembilan) tatanan pokok multidimensi yang menjadi indikator penilaian.	Dinkes
25	NOPEMBER (29/11)	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Katagori Pratama	Kementerian Kesehatan RI	Pemerintah Kota Denpasar yang berkomitmen dan telah menuntaskan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) atau lebih dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF).	Dinkes
26	DESEMBER (7/12)	Penghargaan Meritokrasi KASN 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Pemkot Denpasar berhasil mengimplementasikan sistem merit pada manajemen ASN.	BKPSDM
27	DESEMBER (14/12)	Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik	Ombudsman RI	Pemkot Denpasar telah berhasil melaksanakan kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.	Organisasi
28	DESEMBER (18/12)	TOP 45 Inovasi Terpuji	Kementerian PAN dan RB RI	Radio RPKD 92.5 FM Pemerintah Kota Denpasar mampu memberikan siaran yang bermanfaat bagi masyarakat dengan 9 program siaran andalannya.	Diskominfo
29	DESEMBER (18/12)	Juara 1 Radio Host Terbaik Indonesia Persada.ID	Kementerian PAN dan RB RI	Radio RPKD 92.5 FM Pemerintah Kota Denpasar dalam membawakan programnya melibatkan host difabel dan host terbaik	Diskominfo
30	DESEMBER (18/12)	Penghargaan untuk Pemenuhan Hak Anak PUSPAGA	Kementerian PPPA RI	Peran PUSPAGA Dharma Negara sangat aktif dalam membantu mensosialisasikan pemenuhan hak anak di Kota Denpasar.	P3AP2KB

31	DESEMBER (18/12)	Penghargaan untuk Pemenuhan Hak Anak Puskesmas Ramah Anak (PRA)	Kementerian PPPA RI	Karena Puskesmas I Kecamatan Denpasar Timur telah mampu menyediakan pelayanan ramah anak	P3AP2KB
32	DESEMBER (18/12)	Penghargaan untuk Pemenuhan Hak Anak Sekolah Ramah Anak (SRA)	Kementerian PPPA RI	Penghargaan ini di berikan mengingat TK Negeri Pembina Denpasar Utara telah mampu menyediakan pelayanan untuk pemenuhan hak anak.	P3AP2KB
33	DESEMBER (20/12)	Desa Tegal Harum Peringkat Pertama Desa Transparan Tingkat Nasional	Wakil Presiden RI	Desa Tegal Harum telah mampu memberikan informasi publik secara transparansi.	Desa Tegal Harum
34	DESEMBER (20/12)	Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Katagori Mentor	Kementerian PPPA RI	Komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan Kesetaraan Gender telah dituangkan dalam beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam upaya melindungi perempuan dan anak di Kota Denpasar	Dinas P3AP2KB
35	DESEMBER (21/12)	Penghargaan Pencegahan Korupsi	KPK	Karena Pemerintah Kota Denpasar telah mampu mempertahankan nilai MCP (Monitoring Center for Prevention	Inspektorat
36	DESEMBER (21/12)	Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	Kementerian PPPA RI	Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan serta perlindungan anak.	Dinas P3AP2KB



JL. GAJAH MADA NO 1 DENPASAR



EMAIL : ORGANISASI_DENPASAR@YAHOO.CO.ID



JL. GAJAH MADA NO 1 DENPASAR